

**PENGARUH PERECANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN  
(STUDI KASUS PADA KECAMATAN BACAN, KECAMATAN BACAN SELATAN  
DAN KECAMATAN BACAN TIMUR)**

**M. Aprialdy Husen<sup>1</sup>, Muhsin N. Bailusy<sup>2</sup>, Hartaty Hadady<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> m.aprialdyhusen78@gmail.com, Universitas Khairun

<sup>2)</sup> muhsin.bailusy@unkhair.ac.id, Universitas Khairun

<sup>3)</sup> Hartaty.hadady@unkhair.ac.id, Universitas Khairun

Received: 05 Januari 2022

Reviewed: 09 Maret 2022

Accepted: 06 April 2022

Published: 23 Juni 2022

**ABSTRACT**

**Objective:** The main objectives of this study were to determine and analyze: the influence of planning on budget absorption in Bacan sub-district, southern Bacan sub-district and eastern Bacan sub-district; and the influence of the budget on budget absorption in Bacan sub-district, southern Bacan sub-district and eastern Bacan sub-district.

**Methodology:** This study uses multiple linear regression analysis using SPSS version 23 as a statistical test tool. The data collection tools used were questionnaires and interviews, and the number of respondents was 99 respondents spread over the southern Halmahera district.

**Finding:** In the regression output, the significance number for the Planning variable is 0.731. This value is greater than the significance level of 0.05 so that it states that budget planning has no effect on budget absorption and it can be concluded that H1 is rejected because it is supported by the data and is not in accordance with research expectations. At the output of the regression obtained a significant figure for the budget implementation variable of 0.000. This value is smaller than the significance level of 0.05, indicating that budget execution has a positive effect on budget absorption and it can be concluded that H2 is accepted.

**Conclusion:** (1) Planning has no effect on budget absorption in Bacan District, South Bacan District and East Bacan District. It can be seen from the significance figure for the budget planning variable that it is 0.731 because there are still many village officials who have planned or have budgeted for a plan but in implementation it is not realized so that it can weaken the absorption capacity of the budget; and (2) budget implementation has an effect on budget absorption in South Halmahera in Bacan District, South Bacan District and East Bacan District. It can be seen from the significance figure for the budget implementation variable, which is 0.000. Because if the implementation is good, it can absorb the budget itself and vice versa.

**Keyword :** Planning; Budget Execution; and Budget Absorption.

**PENDAHULUAN**

UUD Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa penyelenggaraan PEMDA di arahkan untuk memperlancar terwujudnya ketentraman bangsa, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas saing pemerintah daerah dengan mengacuh pada pedoman demokrasi, pemetaan, keadilan, dan karakter suatu daerah dalam NKRI.

UUD tersebut juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik, harus makin mencermati hubungan antara pusat dan daerah, kapasitas dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan (Hernandez Sampieri Roberto, 2014).

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Maluku Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini adalah Labuha. Sebagian besar Halmahera Selatan adalah perairan dan memiliki luas 31.484,40 km<sup>2</sup> atau 78%, luas keseluruhan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas 40.263,72 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 228.771 (2019).

Kabupaten Halmahera Selatan adalah perwujudan dari hasil pemekaran Kabupaten Malut (Maluku Utara) atau pada masa kini menjadi Kabupaten Halmahera Barat menurut UUD Nomor 1 tahun 2003 atas pemekaran Kabupaten Malut. Kabupaten Halmahera Selatan pada mula pembentukannya mempunyai 9 kecamatan tetapi sekarang telah mencapai 30 kecamatan dengan 249 desa ([halmaheraselatankab.go.id](http://halmaheraselatankab.go.id)).

Desa adalah unit pemerintahan yang rendah dari kabupaten/kota. Keberadaan desa amat berharga, baik sebagai sarana agar menggapai tujuan pengembangan ataupun sebagai instansi pemerintahan yang menguatkan sistem pemerintahan NRI. Pemerintahan Desa diadakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki fungsi begitu amat penting guna terwujudnya pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa merupakan sektor dari struktur tatanan negara dan sekaligus selaku pejabat lokal yang memiliki peran yang bermanfaat dalam mendirikan dan mengatur Pemerintahan Desa (Suarez, 2015).

Lambatnya penyerapan anggaran oleh pemerintah desa merupakan hal yang sudah lazim terjadi di Indonesia, bahkan selalu terjalin tiap tahun. Penyerapan anggaran begitu kecil di dini tahun namun ada peningkatan signifikan pada penutup tahun. Hal ini berpengaruh atas lambatnya pelaksanaan jadwal serta aktifitas pemerintah. Ketika dikaitkan dengan perluasan sarana universal, akibat keterlambatan ini bakal mempengaruhi apa yang diuntungkan serta dirasakan warga, tidak hanya buruknya mutu benda serta jasa yang di sediakan untuk waktu yang minim (Malayati, 2015).

Gagalnya sasaran penyerapan anggaran sungguh berimbas pada lenyapnya pendapatan biaya Negara, ternyata tidak semua anggaran yang disalurkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, artinya ada uang menganggur (*idle money*). Dependensi asal pendanaan yang dipunyai Negara bisa dimaksimalkan buat membiayai agenda penting. Keterbatasan mata akseptor Negara menuntut pemerintah untuk memprioritaskan agenda dan menyalurkan anggaran yang akurat. Penyerapan anggaran yang kurang dari sasaran berarti penyaluran anggaran tidak baik dan tidak berhasil (BPKP, 2011).

Perencanaan bagaikan rujukan kepada penganggaran atas dasarnya untuk prosedur guna mengatur planing pengasilan, belanja, dan pembiayaan bagi jangka waktu tertentu. Perencanaan yang kurang komprehensif pada penetapan anggaran yang hendak disuguhkan dapat berakibat fatal pada agenda kerja, Pemicu kurangnya penyerapan anggaran di sebabkan tidak sejalannya perencanaan anggaran serta agenda kerja yang bakal dilakukan. (Zarinah, 2016).

Pelaksanaan anggaran ialah tingkatan pengelolaan keuangan yang perlu dicoba sesudah mekanisme perencanaan anggaran berakhir. Pelaksanaan ialah upaya yang dilakukan guna mewujudkan seluruh rencana serta kebijakan yang sudah di resmikan. Pelaksanaan anggaran mencakup pengontrolan atas penggunaan perlengkapan yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan anggaran serupa dengan cara pembayaran atau tanggungan APBD, maka dalam pelaksanaan anggaran sangat diperlukan tertib administrasi (Kelejan 1918).

**Tabel 1.1. Daftar Dana Desa Tahun 2019**

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa</b>
Bacan Selatan	Panamboang	794,516
Bacan Selatan	Sawadai	730,555
Bacan Selatan	Gandasuli	806,296
Bacan Selatan	Kubung	798,661
Bacan Selatan	Mandaong	796,599
Bacan Selatan	Kampung Makian	746,877
Bacan Selatan	Tembal	734,544
Bacan Selatan	Kupal	740,663
Bacan Selatan	Tuokona	734,816
Bacan Selatan	Papaloang	745,099
Bacan	Kaputusan	784,207
Bacan	Amasing Kali	761,750
Bacan	Sumae	760,197
Bacan	Amasing Kota	915,414
Bacan	Indomut	759,643
Bacan	Hidayat	781,034
Bacan	Amasing Kota Utara	846,129
Bacan	Labuha	921,263
Bacan	Suma Tinggi	851,046
Bacan	Marabose	813,640
Bacan	Belang Belang	795,933
Bacan	Tomori	768,529
Bacan	Awanggoa	725,842
Bacan	Amasing Kota Barat	925,803
Bacan Timur	Kaireu	758,634
Bacan Timur	Bori	773,340
Bacan Timur	Sabatang	829,099
Bacan Timur	Babang	792,681
Bacan Timur	Timlonga	742,612
Bacan Timur	Wayamiga	769,197
Bacan Timur	Sayoang	802,866
Bacan Timur	Goro-Goro	838,868
Bacan Timur	Sali Kecil	721,403
Bacan Timur	Nyonyifi	799,129

Sumber: Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, 2022.

**Tabel 1.2. Daftar Dana Desa Tahun 2020**

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa
Bacan Selatan	Kampung Makian	791,605,000
Bacan Selatan	Mandaong	784,320,000
Bacan Selatan	Kupal	885,214,000
Bacan Selatan	Gandasuli	792,430,000
Bacan Selatan	Sawadai	712,304,000
Bacan Selatan	Tuokona	920,949,000
Bacan Selatan	Papaloang	734,951,000
Bacan Selatan	Tembal	720,620,000
Bacan Selatan	Kubung	814,986,000
Bacan Selatan	Panamboang	792,648,000
Bacan	Labuha	961,568,000
Bacan	Amasing Kota	938,039,000
Bacan	Amasing Kali	751,407,000
Bacan	Tomori	897,496,000
Bacan	Indomut	737,173,000
Bacan	Belang Belang	810,769,000
Bacan	Sumae	752,808,000
Bacan	Kaputusan	771,568,000
Bacan	Amasing Kota Barat	1,019,635,000
Bacan	Amasing Kota Utara	840,042,000
Bacan	Awanggoa	841,155,000
Bacan	Suma Tinggi	824,051,000
Bacan	Hidayat	738,470,000
Bacan	Marabose	811,180,000
Bacan Timur	Babang	801,643,000
Bacan Timur	Bori	798,931,000
Bacan Timur	Nyonyifi	915,889,000
Bacan Timur	Sabatang	830,518,000
Bacan Timur	Goro-Goro	836,693,000
Bacan Timur	Sali Kecil	712,511,000
Bacan Timur	Timlonga	728,045,000
Bacan Timur	Sayoang	832,687,000
Bacan Timur	Wayamiga	761,307,000
Bacan Timur	Kaireu	759,378,000

Sumber: Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan maka jumlah penyerapan anggaran tiap-tiap desa ada yang menurun dan yang naik mulai dari 2019 sampai 2020.

Beralaskan latar belakang di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur?; dan Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur?

### **Teori Keagenan**

Penyerapan anggaran dari pandangan teori keagenan terjadi saat satu orang maupun kian lebih memperkerjakan orang lain buat membagikan layanan maka akhirnya mendelegasi kekuasaan pemungutan keputusan pada agen. Dasar utaman teori tersebut adalah terdapat jalinan kerja antara bagian (lembaga) yang melegalkan kekuasaan, ialah pemerintah. Teori keagenan mengemukakan bahwa ikatan antara dua pihak yang ikut serta dalam suatu perjanjian didasari oleh agen menjadi pihak yang bertanggung jawab akan peran maka prinsipal selaku pihak yang bertanggung jawab.

Penelitian ini didasari pada teori keagenan, yang menghubungkan ikatan antara pemerintah selaku agen maka masyarakat selaku prinsipal. Pemerintah selaku fidusia warga mempunyai kewajiban kepada rakyat sebagai pihak yang berwenang guna memberikan pertanggung jawaban, menampilkan, pelaporan dan menunjukkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan telah digunakan di area publik, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Ikatan ini menghadapi selisih kepentingan antara pemerintah beserta rakyat, dan ada perbedaan informasi terkait bisnis yang dimiliki antara pemerintah dan masyarakat yang dapat menyebabkan konflik di antara kedua belah pihak.

Teori Keagenan menyokong berkembangnya peraturan guna menata aturan untuk digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kerja pemerintah dan masyarakat (Ningtyas, 2020). Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan principal agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Abdullah, dalam Ferdinan dkk., 2020).

### **Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran bukan sasaran dari bagian anggaran. Tetapi, sejauh ini indikator yang digunakan buat mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah ialah kuantitas anggaran yang diserap. Penyerapan anggaran mencerminkan kapasitas pemerintah daerah saat melakukan dan bertanggung jawab atas per aktivitas terakumulasi yang dibuat oleh SKPD. Berdasarkan penelitian Noviwijaya & Rohman (2013), Penyerapan anggaran ialah pengeluaran atau dicapai pada satu musim penganggaran. Menghitung penyerapan memerlukan lebih dari hanya membedakan anggaran yang sudah ada dan biaya yang aktual. Penyerapan anggaran yang bertanggung jawab dan bernilai uang adalah salah satunya menerapkan aplikasi cara mengatur yang baik dan menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah (Ramdhani & Anisa, 2017).

Menurut Kuncoro (2013), penyerapan anggaran, berupa “ ukuran sejauh mana suatu organisasi/instansi telah mencapai target rencana”. Sebaliknya menurut Noviwijaya dan Rohman (2013), Penyerapan anggaran adalah “perbandingan anggaran unit yang sudah dibayarkan ataupun dilaksanakan pada 1 musim anggaran”.

Suhartono (2011), proporsionalitas bermakna penyerapan anggaran secara nisbi untuk setiap periode dapat mencapai presentase yang hampir sama dengan target

penyerapan anggaran yaitu 25% per tiga bulan. Rasio penyerapan anggaran disukat oleh mengestimasi perbedaan antara kualitas pencapaian anggaran triwulanan atas sasaran penyerapan anggaran triwulanan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dijelaskan penyerapan anggaran adalah anggaran yang terealisasi dalam jangka waktu tertentu agar dapat diketahui rasio pengeluaran anggaran (Jauhari, 2017).

### **Perencanaan**

Perencanaan ialah mekanisme mengidentifikasi tujuan organisasi dan kemudian mengartikulasi taktik, strategi, dan aktivitas yang dibutuhkan untuk memperoleh harapan instansi selaku keseluruhan (Suandy, 2011). Selanjutnya anggaran bisa didefinisikan sebagai satu agenda yang dibuat secara tertata yang mencakup semua agenda instansi yang diklaim dalam satuan moneter dan berlaku untuk suatu periode tertentu dimasa mendatang (Muhammad Munandar, 2013).

Anggaran adalah “pernyataan menyeluruh tentang perhitungan pendapatan serta di harapkan terjadinya pengeluaran dalam satu musim mendatang atau lebih dari satu musim” (Bastian, 2019). Mardiasmo (2016) mengartikan anggaran semacam pemberitahuan tentang perkiraan kemampuan yang akan diraih dalam musim tertentu akan ditentukan pada tingkatan keuangan. Mulyadi (2016) mengemukakan anggaran adalah planning aktifitas kuantitatif, diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, meliputi satu tahun. Oleh karena itu, Perencanaan anggaran secara sederhana dapat diartikan sebagai bagaimana dana tersebut digunakan dengan benar untuk tindakan di masa yang akan datang.

### **Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran ialah tingkatan manajemen keuangan yang harus dicoba sesudah proses perencanaan anggaran berakhir. Pelaksanaan ialah upaya yang dilakukan guna mewujudkan seluruh rencana serta kebijakan yang sudah di resmikan. Pelaksanaan anggaran mencakup pengontrolan atas penggunaan perlengkapan yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan anggaran serupa dengan cara pembayaran atau tanggungan APBD, maka dalam pelaksanaan anggaran sangat diperlukan tertib administrasi (Kelejan 1918).

Penjelasan pelaksanaan anggaran menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 ialah “dokumen yang menciptakan penerimaan, pengeluaran dan pebiayaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengguna anggaran”, dari penjelasan tersebut dirumuskan maka pelaksanaan anggaran merupakan jenjang aktivitas yang dilakukan bagi setiap pelaksana anggaran, dan berguna dalam rangka pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan akan dijalankan dengan efisien searah dengan ketentuan. Eksekusi anggaran menggambarkan usaha guna mencapai rencana anggaran yang dirancang. Pelaksanaan anggaran menggambarkan kegiatan yang berkaitan atas pemakaian anggaran yang dipegang untuk masing-masing SKPD yang termasuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD). Landasan aturan pelaksanaan anggaran SKPD ialah DPA SKPD di setujui Sekretaris daerah serta disetujui kepala pengelola keuangan daerah. Berdasarkan DPA SKPD, kas umum daerah adalah tempat pengajuan permohonan belanja anggaran, khususnya pimpinan SKPD sebagai pemakai anggaran. Pencairan dana atas jumlah dan kas umum daerah atas tanggungan APBD dibuat dengan surat Pembiayaan (SPD).

## **Kerangka Pikir**

### **Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Perencanaan bagaikan rujukan kepada penganggaran atas dasarnya guna prosedur mengatur planing pengasilan, belanja, dan pembiayaan bagi jangka waktu tertentu. Perencanaan yang kurang komprehensif pada penetapan anggaran yang hendak disuguhkan dapat berakibat fatal pada agenda kerja, Pemicu kurangnya penyerapan anggaran di sebabkan tidak sejalannya perencanaan anggaran serta agenda kerja yang bakal dilakukan (Zarinah, 2016).

Penelitian Zarinah (2016), menemukan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan pada SKPD pada Kabupaten Aceh Utara. Penelitian Jauhari (2017), juga menemukan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. Berdasarkan hasil determinasi parsial menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran lebih berpengaruh terhadap variabel penyerapan anggaran.

Penelitian Putri dkk (2017), juga menemukan bahwa perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di wilayah pemerintah daerah Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian Harahap dkk (2020), Juga menemukan bahwa variable perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

H1: Perencanaan mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

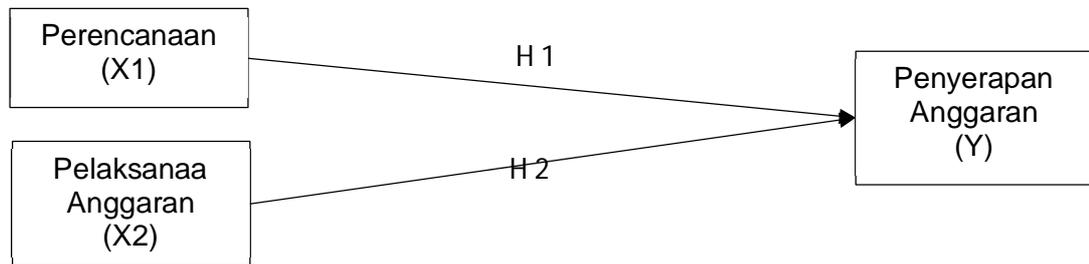
### **Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran**

Pelaksanaan angaran ialah tingkatan pengelolaan keuangan yang perlu dicoba sesudah mekanisme perencanaan anggaran berakhir. Pelaksanaan ialah upaya yang dilakukan guna mewujudkan seluruh rencana serta kebijakan yang sudah di resmikan. Pelaksanaan anggaran mencakup pengontrolan atas penggunaan perlengkapan yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan anggaran serupa dengan cara pembayaran atau tanggungan APBD, maka dalam pelaksanaan anggaran sangat diperlukan tertib administrasi (Kelejan 1918).

Penelitian Malayati dkk (2015), menemukan variable pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Provinsi Banda Aceh. Penelitian Ramdhani & Anisa (2017), juga menemukan variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Provinsi Banten. Penelitian Luz Yolanda Toro Suarez dkk (2015), Menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap serapan anggaran SKPD. Secara parsial pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Harahap dkk (2020), Juga menemukan bahwa variable pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

H2: Pelaksanaan Anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini adalah Perencanaan (X1) dan Pelaksanaan Anggaran (X2) sebagai variabel bebas, Penyerapan Anggaran (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta kerangka penelitian dan beberapa penelitian terdahulu serta landasan teori hingga peneliti mengemukakan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

**METODE PENELITIAN**

**Pengembangan Pengukuran**

Perencanaan anggaran merupakan suatu proses penyusunan anggaran melalui prosedur dan mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan (Herriyanto, 2012). Indikatornya adalah Penyusunan Rencana Kerja; Strategi Implementasi; dan Penetapan Rancangan Anggaran.

Pelaksanaan merupakan kegiatan usaha untuk mencapai semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan (Gagola dkk., 2017). Indikatornya adalah Budaya Kerja; Proses Penyelesaian Administrasi; dan Jadwal anggaran kas

Penyerapan anggaran merupakan tingkat pencapaian realisasi anggaran sebagai bentuk kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi (Irwan, 2017). Indikatornya adalah Tingkat Penyerapan Anggaran; dan Proses Pencairan.

**Model Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Model regresi yang di kembangkan untuk menguji hipotesis yang telah di rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan Anggaran
- a = Nilai konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien determinasi
- X1 = Perencanaan
- X2 = Pelaksanaan Anggaran
- $\epsilon$  = error

**Teknis Analisis Data**

Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat yakni pengaruh Perancangan dan Pelaksanaan Anggaran secara parsial maupun simultan terhadap Penyerapan Anggaran, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 23 sebagai alat uji statistik.

Uji statisti deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistic untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif dalam penelitian ini digunakan jumlah dan persentase. Validitas adalah seberapa baik

sebuah tes mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Validitas setiap item diuji dengan menggunakan analisis item, yang menghubungkan skor untuk setiap item atau faktor dengan skor total, yang merupakan jumlah skor untuk setiap item. Syarat minimal kuisioner untuk memenuhi validitas adalah apakah korelasi antara item dengan skor total positif dan kuantitasnya  $\geq 0,03$  (Sugiyono, 2013).

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan koefisien varian ( $\alpha$ ) dan rtabel. Suatu item atau variabel dikatakan reliabel jika nilai koefisien ( $\alpha$ ) lebih besar dari rtabel (0,60). Sedangkan jika nilai koefisien ( $\alpha$ ) lebih kecil dari r tabel (0,60) maka item atau variabel tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Maluku Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini adalah Labuha. Sebagian besar Halmahera Selatan adalah perairan dan memiliki luas 31.484,40 km<sup>2</sup> atau 78%, total luas Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas 40.263,72 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 228.771 (2019).

Kabupaten Halmahera Selatan ialah perwujudan dari hasil pemekaran Kabupaten Maluku Utara atau pada masa kini menjadi Kabupaten Halmahera Barat menurut UUD Nomor 1 tahun 2003 atas pemekaran Kabupaten Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan pada mula pembentukannya mempunyai 9 kecamatan tetapi sekarang telah mencapai 30 kecamatan dengan 249 desa ([halmaheraselatankab.go.id](http://halmaheraselatankab.go.id)).

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Kecamatan Bacan terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Bacan Selatan terdiri dari 10 Desa dan Kecamatan Bacan Timur terdiri dari 9 Desa.

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama menduduki posisi/jabatan. Sampel yang digunakan sebanyak 84 karena selama penelitian yang terjadi di lapangan ada beberapa desa yang tidak bisa di jangkau oleh peneliti di karenakan terkendala transportasi dan biaya. Responden yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Keterangan		Jumlah	(%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	75	89%
	Perempuan	9	11%
Usia	20-30 Tahun	7	8%
	31-40 Tahun	32	38%
	41-50 Tahun	31	37%
	>51 Tahun	14	17%
Pendidikan	SMP	9	11%
	SMA	56	67%
	Diploma (D1)	2	2%
	Strata 1 (S1)	16	19%
	Strata 2 (S2)	1	1%
	0-2 Tahun	15	18%

Keterangan		Jumlah	(%)
Lama Megegang Posisi/Jabatan	2-5 Tahun	37	44%
	5-10 Tahun	25	30%
	>10 Tahun	7	8%

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan data deskriptif dari tabel 1 diperoleh informasi bahwa frekuensi responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75 orang dengan presentase 89 persen dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang dengan presentase 11 persen dari jumlah sampel sebanyak 84 orang. Melalui informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan besar responden dalam penelitian ini yaitu sebesar 89 persen atau sebanyak 75 orang.

Berdasarkan data deskriptif dari table 1 diperoleh informasi bahwa frekuensi responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 7 orang dengan presentase 8 persen, usia 31-40 tahun sebanyak 32 orang dengan presentase 38 persen, usia 41-50 tahun sebanyak 31 orang dengan presentase 37 persen, dan yang berusia >51 tahun sebanyak 14 orang dengan presentase 17 persen dari jumlah sampel 84 orang. Melalui informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian berusia 31-40 tahun dengan besar responden dalam penelitian ini yaitu sebesar 38 persen atau sebanyak 32 orang.

Berdasarkan data deskriptif dari tabel 1 di peroleh informasi bahwa frekuensi responden yang berpendidikan SMP sebanyak 9 orang dengan presentase 11 persen, pendidikan SMA sebanyak 56 orang dengan persentase 67 persen, pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 2 orang dengan persentase 2 persen, pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang dengan persentase 19 persen, dan yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang dengan presentase 1 persen dari jumlah 84 orang. Melalui informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian berpendidikan SMA dengan besar responden dalam penelitian ini yaitu sebesar 67 persen atau sebanyak 56 orang.

Berdasarkan data deskriptif dari tabel 1 di peroleh informasi bahwa frekuensi responden yang lama memegang posisi/jabatan 0-2 tahun sebanyak 15 orang dengan presentase 18 persen, lama memegang posisi/jabatan 2-5 tahun sebanyak 37 orang dengan presentase 44 persen, lama memegang posisi/jabatan 5-10 tahun sebanyak 25 orang dengan presentase 30 persen, dan lama memegang posisi/jabatan >10 tahun sebanyak 7 orang dengan presentase 8 persen dari jumlah 84 orang. Melalui informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian lama memegang jabatan/posisi 2-5 tahun dengan besar responden dalam penelitian ini yaitu sebesar 44 persen atau sebanyak 37 orang.

### Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dilakukan dan reliabilitas diuji dengan bantuan program *SPSS for Windows release 23.0*. Pengujian validitas digunakan sebagai korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Pearson Correlation (Ghozali, 2018). Jika dilihat dari rtabel atau Person Correlations < sig. 0,03 dan nilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi

alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Hasil uji validitas dan reliabilitas dijabarkan pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas**

Variabel	Indikator	Nilai r	Loading Signifikan	Cronbach's Alpha
Perencanaan	X1.1	0.805	0.000	0,754
	X1.2	0.736	0.000	
	X1.3	0.739	0.000	
	X1.4	0.536	0.000	
	X1.5	0.777	0.000	
Pelaksanaan Anggaran	X2.1	0.402	0.000	0,605
	X2.2	0.670	0.000	
	X2.3	0.653	0.000	
	X2.4	0.626	0.000	
	X2.5	0.700	0.000	
	X2.6	0.406	0.000	
Penyerapan Anggaran	Y.1	0.545	0.000	0,667
	Y.2	0.637	0.000	
	Y.3	0.699	0.000	
	Y.4	0.678	0.000	
	Y.5	0.724	0.000	

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Hasil analisis uji validitas seperti yang disajikan pada table 2 untuk variabel Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran validitas pada taraf signifikansi 5%. Dimana tiap pernyataan memiliki nilai yang lebih besar dari 0.03 dengan nilai r table sebesar 0.178. Artinya tiap pertanyaan berkorelasi dengan skor-skor totalnya dan semuanya dinyatakan valid.

Pengujian *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji tingkat keandalan (*reliability*) dari masing-masing angket variabel. Apabila nilai *Cronbach Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya. Secara ringkas hasil uji reliabilitas di tunjukan pada tabel 2. Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien realibilitas (r) lebih besar dari 0.6, jadi seluruh item pertanyaan dinyatakan reliable. Sesuai dengan pendapat Gozali (2018), bahwa pernyataan dinyatakan reliabel (handal) jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.6. jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel (andal).

### Pengujian Hipotesis

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.325	2.016		1.154	.252
Perencanaan Anggaran	.033	.095	.030	.345	.731
Pelaksanaan Anggaran	.639	.086	.653	7.421	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran  
Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  $Y = 2,325 + 0,033X_1 + 0,639X_2 + \varepsilon$ . Nilai *Constant* sebesar 2,325 menyatakan bahwa variabel independen Perencanaan ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ), sama dengan nol maka variabel dependen Penyerapan Anggaran ( $Y$ ) adalah sebesar 2,325 satuan. Nilai Koefisien  $\beta_1 = 0,033X_1$  menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Perencanaan ( $X_1$ ) terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ ) sebesar 0,033. Nilai Koefisien  $\beta_2 = 0,639X_2$  menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) terhadap variabel Penyerapan Anggaran ( $Y$ ) sebesar 0,639.

Pengujian hipotesis menggunakan Regression Linear Berganda dimana akan diuji secara empiris untuk mencari hubungan variabel Perencanaan ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ ). Berdasarkan tabel 3 disimpulkan tentang uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada output regresi diperoleh t hitung = 0,345 lebih kecil t tabel 1,98 dan nilai signifikan = 0,731 lebih besar dari 0,05 (5%). Hasil ini menunjukkan bahwa, perencanaan anggaran ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran ( $Y$ ) atau dapat disimpulkan  $H_1$  ditolak. Selanjutnya hasil uji hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa nilai t hitung = 7,421 lebih besar dari nilai t table = 1,98 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ ).

**Tabel 4. Anova<sup>a</sup>**

Model	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2	249.825	31.809	.000 <sup>b</sup>
Residual	81	7.854		
Total	83			

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Berdasarkan pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung = 31,809 lebih besar dari F tabel = 3,109 dan nilai signifikan = 0,000 lebih kecil  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa secara simultan Perencanaan ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran ( $Y$ ).

**Tabel 5. Model Summary**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.663 <sup>a</sup>	.440	.426	2.80247

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran sebesar 0,663 atau 66,30% sedangkan sisanya 33,7% di jelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

Teori keagenan menurut Jensen dan Mackling (1976) adalah interaksi antara agen dan prinsipal, Agen adalah pihak yang menerima perintah dan prinsipal menjadi pihak pemberi perintah, pengawasan, memberikan nilai dan berinvestasi dalam pelaksanaan tugas-tugas oleh agen. Perencanaan bagaikan rujukan kepada penganggaran atas dasarnya untuk prosedur guna mengatur planing pengasilan, belanja, dan pembiayaan bagi jangka waktu tertentu. Perencanaan yang kurang komprehensif pada penetapan anggaran yang hendak disuguhkan dapat berakibat fatal pada agenda kerja, pemicu kurangnya penyerapan anggaran di sebabkan tidak sejalannya perencanaan anggaran serta agenda kerja yang bakal dilakukan (Zarinah, 2016).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Vety (2020), bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Tegal yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,001.

Berdasarkan uji statistik variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Teori keagenan menurut Jensen dan Mackling (1976) adalah interaksi antara agen dan prinsipal, selain itu agen adalah pihak yang menerima perintah dan prinsipal menjadi pihak pemberi perintah, pengawasan, memberikan nilai dan berinvestasi dalam pelaksanaan tugas-tugas oleh agen.

Pelaksanaan anggaran ialah tingkatan pengelolaan keuangan yang perlu dicoba sesudah mekanisme perencanaan anggaran berakhir. Pelaksanaan ialah upaya yang dilakukan guna mewujudkan seluruh rencana serta kebijakan yang sudah di resmikan. Pelaksanaan anggaran mencakup pengontrolan atas penggunaan perlengkapan yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan anggaran serupa dengan cara pembayaran atau tanggungan APBD, maka dalam pelaksanaan anggaran sangat diperlukan tertib administrasi (Kelejan 1918).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gagola dkk., (2017), bahwa pelaksanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan dengan nilai signifikan ( $p$  value) 0,024 yaitu dibawah nilai alpha ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan nilai koefisien regresi pelaksanaan anggaran sebesar 0,185 menunjukkan jika pelaksanaan anggaran semakin baik, maka semakin baik pula penyerapan anggaran.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perangkat desa telah mengganggu suatu perencanaan namun dalam pelaksanaan tidak terealisasi sehingga dapat memperlemah daya penyerap anggaran tersebut.
2. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Halmahera Selatan di Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Hal ini berarti bahwa adanya dorongan dalam pelaksanaan yang baik sehingga menyerap anggaran, dan dapat terjadi sebaliknya.

### Saran

Saran dalam penelitian adalah : (1) Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran pada Kabupaten Halmahera Selatan di Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur, Mengatur strategi untuk meminimalkan resiko penganggaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penyerapan anggaran; (2) Peneliti selanjutnya mampu mempertimbangkan untuk menerapkan kombinasi metode Kuantitatif dan kualitatif (*mix method*), menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan hasil yang didapat dengan metode kuantitatif, sehingga mampu menarik kesimpulan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan mengembangkan kuesioner lebih lanjut sehingga mampu mengungkapkan variabel lain yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Kabupaten Halmahera Selatan di Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur atau di Kabupaten lain yang akan diteliti dan jumlah sampel penelitian sebaiknya diperbanyak sehingga kesimpulan yang dibuat dimungkinkan tingkat generalisasi yang lebih baik.

## REFERENSI

- Ardiansyah, Endar Pituringsih, dan Muhammad Irwan, 2017. *Determinant Of Budget Absorption With Time Pressure And Environmental Uncertainty As Stimulants, International Conference and Call for Papers.*
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. *Paris Review*, 1–56. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/PARIS\\_REV\\_NEW/PR\\_Ed\\_6kcl.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/PARIS_REV_NEW/PR_Ed_6kcl.pdf).
- Ferdinan, Isnurhadi, Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 117-134. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/index>.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Indarto, S.L., & Ghozali, I. (2016). Fraud diamond: Detection analysis on the fraudulent

- financial reporting. *Risk governance & control: financial markets & institutions*, 6(4-1), 116-123. <https://doi.org/10.22495/rcgv6i4c1art1>.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan administrasi dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (studi empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Hernandez Sampieri Roberto. (2014). No 7(2), 1–16. <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Irwan, M. (n.d.). *Determinant of Budget Absorption With Time Pressure*. 1081–1094.
- Jauhari, 2017. Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I Dan Kppn Bandung II. *Disertasi, Universitas Pasunda*.
- Kelejan, R. A., Lengkong, V. P. K., & Tawas, H. N. (1918). Pengaruh Perencanaan *Jurnal EMBA*, 6(4), 164–182. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20913>
- Malahayati, C., Islahuddin., Hasan B. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi Vol. 4, No. 1, 11-19*. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451>.
- Ningtyas, W. P. M. (2020). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Putri, K. M. R., Yuniarti, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Assets*, 8(1), 120–132.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Vety, Y. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Triwulan Iv Tahun 2019 Pada Uptd Puskesmas Di Kabupaten Tegal. *SKRIPSI, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.